

# **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( Studi pada SKPD Kota Lhokseumawe)**

**Mawaddah, Murhaban dan Dewi Keumala Sari**

Program studi Akuntansi  
STIE Lhokseumawe

## ***Abstract***

*This study aims to examine the effect of the presentation of financial statements, the accessibility of financial statements and the application of the government's internal control system to the accountability of regional financial management at SKPD in Lhokseumawe. The data used in this study is primary data. The sample in this study consisted of 70 employees at 35 SKPD in Lhokseumawe. Data processing is done using multiple linear regression analysis. The results of the study that are: Partially, the presentation of financial statements has a significant effect on the accountability of regional financial management at SKPD in Lhokseumawe. Accessibility of financial statements has a significant effect on the accountability of regional financial management at SKPD in Lhokseumawe. The implementation of the government's internal control system has a significant effect on the accountability of regional financial management at SKPD in Lhokseumawe. Simultaneously, the presentation of financial statements, the accessibility of financial statements and the application of the government's internal control system have a significant effect on the accountability of regional financial management at SKPD in Lhokseumawe.*

**Key Words:** *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Application of Government's Internal Control System, Accountability of Regional Financial Management*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara

pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian terpenting dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses

demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Nurlaili, 2016).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengendalian terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dapat dilakukan dari luar maupun dari dalam. Dari luar dilakukan oleh DPRD dan masyarakat, sedangkan

pengawasan dari dalam dilakukan oleh inspektorat yang ada di daerah.

Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut (Nurlaili, 2016).

Salah satu yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Wahyuni, dkk. (2014) juga telah membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Selain penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengendalian internal. Pengendalian

yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Lhokseumawe bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe menyajikan saldo utang belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 240.048.847.250,88. Saldo utang belanja yang disajikan tersebut berbeda dengan pernyataan utang yang ditandatangani oleh 35 Kepala SKPD sebesar Rp. 243.949.653.433,00 dan hasil *reviu* Inspektorat sebesar Rp. 205.306.255.623,00. Selain itu, menurut BPK, dari saldo utang belanja yang disajikan tersebut di antaranya terdapat pengakuan utang atas pengadaan barang yang tidak dilaksanakan oleh SKPD. Posisi utang belanja yang disampaikan oleh SKPD terus berubah, tanpa didukung penjelasan dan dokumen yang memadai yang berindikasi *fraud* serta atas kegiatan yang telah diselesaikan

pembayarannya Portal Satu, 29 September 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Lhokseumawe)".

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:25).

Sementara menurut Noudirwan (2007:151) laporan keuangan merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

### **2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan**

Secara umum laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu organisasi, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan organisasi maupun secara berkala. Komite SAP (2005:1) menjelaskan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

### **3. Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi

mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006:41).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002:78).

#### **4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pengendalian merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi atau kantor pemerintahan menyediakan keyakinan yang memadai mengenai informasi pelaporan keuangan organisasi. Menurut Susanto (2008:95) pengendalian internal yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan pegawai yang dirancang untuk memeberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dirancang melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Nawawi (2002:137) pengendalian internal adalah kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor privat karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran.

#### **5. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Nurkholis (2001:67), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu.

Mardiasmo (2002:20) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas kinerja atau akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas kinerja juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi, (Mahmudi, 2010:10).

## **6. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peters dalam Krina (2004:71) menyebutkan adanya tiga unsur akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik.

### **1. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas Keuangan adalah keuangan yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib adalah bahwa keuangan harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan (Peters dalam Krina, 2004:71).

### **2. Akuntabilitas Administratif**

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak pengendalian kebijakan. Pengambilan keputusan dalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak (Peters dalam Krina, 2004:72).

### **3. Akuntabilitas Kebijakan Publik**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 239, Akuntabilitas Kebijakan meliputi:

- a. Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada SAP
- b. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- c. Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - (a) Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam keuangan;
  - (b) Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- d. Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi asset.

- e. Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan.
- f. Kebijakan kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan sebagai penambah nilai asset tetap.

Menurut Halim (2006:31) prinsip-prinsip *Public Expenditure Management* disebutkan bahwa penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan (*input*) pengeluaran anggaran setidaknya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya

sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

### C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Instrument angket (kuisisioner) gunanya untuk mencari informasi yang lengkap mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memberikan respons menurut opsi pilihan. Adapun angket tersebut berisi butir-butir pernyataan mengenai penyajian laporan keuangan ( $X_1$ ), aksesibilitas laporan keuangan ( $X_2$ ), penerapan sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_3$ ) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif yang mana metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- $\alpha$  : Konstanta
- $X_1$  : Penyajian laporan keuangan
- $X_2$  : Aksesibilitas laporan keuangan
- $X_3$  : Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
- $b_{1-3}$  : Koefisien Regresi
- $e$  : *Error Term*

#### D. Pembahasan

##### 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini juga terlihat dari kriteria tingkat capaian tanggapan responden untuk variabel penyajian laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe termasuk kedalam kategori sangat baik.

Berpengaruhnya penyajian laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe karena Laporan keuangan yang disajikan oleh SKPD Kota Lhokseumawe dapat diuji keandalannya, pengelola keuangan menyajikan laporan keuangan kepada DPR secara rutin tiap-tiap akhir bulan, setiap akhir anggaran pihak keuangan melaporkan segala yang terjadi yang berkaitan dengan penggunaan dana, informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan oleh pengguna dan diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu, laporan keuangan yang disajikan relevan artinya dapat memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan

kejadian masa kini dan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

##### 2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe

Secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini juga terlihat dari kriteria tingkat capaian tanggapan responden untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe termasuk kedalam kategori sangat baik.

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe disebabkan karena laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan, laporan keuangan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan sudah lengkap dan transparan, Pemerintah daerah tidak menutupi seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan kepada pihak publik dan Pemerintah daerah mampu memberikan akses bagi pihak untuk mengetahui dan memperoleh laporan keuangan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap

pemerintah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Nurlaili, 2016).

### **3. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe**

Secara parsial penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini juga terlihat dari kriteria tingkat capaian tanggapan responden untuk variabel penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada SKPD Kota Lhokseumawe termasuk kedalam kategori sangat baik.

Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe disebabkan karena pada SKPD Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan pengendalian, terdapat kebijakan tertulis mengenai kedisiplinan dan kejujuran yang telah ditetapkan, manajemen menetapkan resiko sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian, dalam pengelolaan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe terdapat

sistem informasi akutansi yang dapat memastikan kelengkapan pencatatan transaksi, pengendalian dibidang informasi dan komunikasi terhadap penggunaan keuangan dilakukan secara rutin tiap-tiap bulan, dalam pelaporan keuangan dilakukan pengawasan secara rutin dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban, aktifitas pengendalian dilakukan secara bersama-sama seluruh pegawai dengan pihak pengelolaan keuangan terhadap laporan yang dibuat dan untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, aktifitas pengendalian dilakukan secara berkelanjutan atau periodik

Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe sebesar 86,2%. Sisanya 13,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akutansi, standar akutansi pemerintah, dan lain-lain.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe.
3. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe.
4. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe.

## F. Daftar Pustaka

- Ahmad, S.Ruky. (2006). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Semarang, Universitas Diponegoro.

Hasan, Iqbal. (2002). Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor selatan Ghalia Indonesia.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Krina. (2004). Indikator dan alat ukur prinsip Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas .<http://www.goodgovernance.com>. diakses, 10 Desember 2017.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohammad, dkk. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPF.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.

Mulyana, Budi. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada.

Nawawi, Hadari. (2002). Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: Gajah Mada. University press.

Nordiawan, Deddi. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

- Nur Azizah, dkk. (2015). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal: Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Nurcholis, Hanif. (2001). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *Jurnal: Akuntansi, Universitas Riau, Pekanbaru. JOM Fekon Vol.3 No.1 (Februari) 2016*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Primayani, Putu Riaya, dkk. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal, *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014*.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Rohman, Abdul, (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sanjaya, Wina, dkk. (2014). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Ed I. Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Singgih. (2002). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. XIV, Bandung, Alfabeta.
- Susanto, Azhar. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Lingga Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Mawaddah, Murhaban dan Dewi Keumala Sari

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wahyuni, Putu Sri, dkk. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). Jurnal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.

•